



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ABDIANNOR
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 629061

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 535.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTAWARINGIN TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/22 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/30 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/125 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 30.000 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/50 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 174.000.000**



1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR/SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	765.000.000
Sub Total	Rp.	1.504.000.000
III. HUTANG	Rp.	168.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.335.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI PANDI
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 955454

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.600.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	12.100.000

III. HUTANG Rp. 90.891.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -78.791.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. TAJUDINNOR
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 953494

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/80 m2 di KAB / KOTA
SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 47.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.000.050

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 247.000.050

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 247.000.050

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAOPIK HIDAYAT
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 954095

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	235.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/65 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	566.799
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	242.566.799
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	242.566.799

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIUS SETIAWAN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 681213

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 78.000.000

1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI
Rp. 78.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 293.050.000

1. MOTOR, HONDA NF12A1CF M/T / SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.050.000
2. MOTOR, YAMAHA 2 SX / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER CROSS Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.525.010

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 377.575.010

III. HUTANG Rp. 353.422.135

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 24.152.875

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NENENG YULIA
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 817510

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.613.000.000

1. Tanah Seluas 585 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
2. Tanah Seluas 572 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 318.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/180 m2 di KAB / KOTA
SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 43.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 24.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.822.400.000

III. HUTANG Rp. 476.373.656

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.346.026.344



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.